KEPENTINGAN INDONESIA MELARANG EKSPOR MINERAL NIKEL KE UNI EROPA

Oleh: Ismail

Email: syadzilismail18@gmail.com

Pembimbing : Dr. Umi O Retnaningsih, MA

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Indonesia is the second largest nickel producer countries in the world after Russia. Nickel is a strategic raw material for the battery industry for electric cars, stainless steel, and others. This reasons led Indonesian government to take a different policy from the previous one by exporting in raw one. This research explained the reasons why Indonesian government stop for exporting nickel ore.

This qualitative research used secondary data sources from books, journals, news from magazines and newspapers, official documents from the Indonesian government, and websites. To explain the reasons for the export ban, the author utilized a nation-state analysis with a mercantilism perspective, and the theory of economic nationalism.

The results showed that the reason for this prohibition policy to increase strategic values, politically and economically. Politically, this policy is a countermeasure to increase bargaining power over discrimination against palm oil commodities by the European Union. Economically, the better nickel prices in the global market after the ban on nickel exports. The ban on nickel exports also encouraged better processed of domestic products into value-added commodities.

Keywords: Mining, Nickel, Downstream, Investment, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11 Year 2019

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia berada pada peringkat dua dunia setelah Rusia dalam menghasilkan nikel. Negara penghasil nikel lainnya di antaranya adalah Philipina, Kanada, Australia, New Caledonia, China, Cuba, Colombia. Sementara dari sisi perusahaan, penghasil terbesar nikel

adalah Norilsk (Rusia), Vale (Brazil dan Kanada) dan the BHP Billiton Group (Australia dan UK). Sementara PT Aneka Tambang Tbk (Indonesia) hanya berada pada urutan keempat.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah sehingga biasa disebut dengan zamrud khatulistiwa. Menurut Hans J Morgenthau bahwa

salah satu unsur kekuatan nasional dalam sebuah negara adalah sumber daya alam.¹ Kekuatan nasional bergantung dari bagaimana suatu negara dapat memaksimalkan sumber-sumber kekayaan alam seperti kandungan minyak, batu bara, gas alam, emas, nikel, tembaga dan berbagai bahan tambang lainnya.

Menurut data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia meraih peringkat ke-6 terbesar di dunia kategori negara yang kaya akan sumber daya tambang (emas, tembaga, nikel, dan jenis lainnya. Cadangan emas Indonesia berkisar 2,3% dari cadangan emas dunia dan menduduki posisi ke-6 dalam produksi emas di dunia yakni sekitar 6,7 %. Sedangkan cadangan timah Indonesia menduduki peringkat ke-5 sebesar 8,1% dari cadangan timah dunia menduduki peringkat ke-2 dari sisi produksi sebesar 26 % dari jumlah produksi dunia. Cadangan nikel Indonesia menduduki peringkat ke-8 sebesar 2,9% dari cadangan nikel dunia menduduki peringkat ke-4 dunia dari sisi produksi sebesar 8,6% .

Ekspor nikel resmi dilarang oleh pemerintah dan larangan ini mulai berlaku pada Januari tahun 2020. Adanya larangan ekspor ini bertujuan agar bijih nikel diolah terlebih dahulu di dalam negeri atau hilirisasi, terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia sebaiknya tidak lagi ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah mulai dari ketersediaan cadangan nikel di Indonesia, banyaknya pabrik pengolahan tambang (smelter) yang telah dibangun, sehingga ketersediaan

teknologi di Indonesia yang mumpuni untuk mengolah nikel.

Kementerian ESDM mencatat produksi bijih nikel pada tahun 2019 sebesar 52,8 juta ton, atau meningkat dari periode sebelumnya sebesar 22,1 juta ton. Produksi nikel tahun lalu meningkat karena perusahaan mampu mengolah kembali stok bijih nikel kadar rendah menjadi produk ekspor dengan kadar minimal 1,7%. Secara detail, produksi nikel sulfida tahun lalu hanya 65 ribu ton, turun dibandingkan tahun sebelumnya 75 ribu ton. Feronikel naik menjadi 1,1 juta ton dari tahun sebelumnya sebesar 573 ribu ton, begitu juga dengan produksi nikel pig iron (NPI) tahun lalu naik menjadi 692 ribu ton dibanding tahun sebelumnya sebesar 323 ribu ton.

Larangan ekspor logam tahan karat ini diduga berefek pada perubahan harga jual nikel di pasar global. Saat larangan tersebut diumumkan harga nikel menguat 3,62 persen di angka US\$18.547,5 per ton di bursa London, penghentian ekspor logam ini diprediksi akan memengaruhi perolehan pendapatan beberapa emiten

Akhir-akhir ini Uni Eropa melarang masuknya ekspor sawit asal Indonesia, menanggapi hal ini pemerintah Indonesia mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan-kebijakan yang dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Rencana penghentian pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati di Uni Eropa pada 2030 tercantum dokumen Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II).

¹ Konsep Dasar Kekuatan Nasional: Defenisi Jenis Dan Pengukuran. Di akses melalui: <http://Michael-Ivander-fisip16.web.unair.ac.id>

Pelarangan ini akan berlaku total mulai 2030 dan pengurangan dimulai sejak 2024. Negara-negara anggota Uni Eropa menyoroti masalah deforestasi atau perusakan hutan akibat adanya budidaya sawit yang masif. Menurut Kemendag, kebijakan-kebijakan tersebut membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit sehingga berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan larangan ekspor bijih nikel yang berlaku mulai 1 Januari 2020 merupakan bagian dari tawar menawar terhadap diskriminasi komoditas kelapa sawit oleh Uni Eropa. Menanggapi hal ini Uni Eropa juga mengugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kebijakan ini dianggap akan menyulitkan industri yang ada di Eropa. Uni Eropa pada 22 November lalu resmi mengajukan keluhan kepada WTO perihal pembatasan Indonesia pada ekspor nikel, bijih besi, dan kromium yang digunakan sebagai bahan baku industri baja nirkarat (stainless steel) Eropa.²

Uni Eropa menuduh bahwa pembatasan itu dirancang Indonesia untuk menguntungkan industri peleburan dan baja nirkarat sendiri. Komisi Eropa, yang mengoordinasikan kebijakan perdagangan di Uni Eropa mengatakan, tidak adil bahwa akses produsen UE terhadap komoditas tersebut menjadi dibatasi. Keluhan Komisi mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari

rencana untuk mengembangkan industri baja nirkarat Indonesia. Kebijakan pelarangan tersebut berimbas negatif pada industri baja Uni Eropa karena terbatasnya akses terhadap bijih nikel dan juga bijih mineral lainnya seperti bijih besi dan kromium.³

Nilai ekspor nikel paling besar di dunia sepanjang tahun 2018 seperti yang dikutip dari World's Top Exports yaitu: Berikut ini data ekspor nikel dunia sepanjang tahun 2018.

Menipisnya jumlah nikel di alam, membuat pemerintah mengambil langkah hilirisasi dan industrialisasi bahan-bahan mentah Sumber Daya Alam yang dimiliki. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor bijih nikel per 2020. Dari sebelumnya ekspor bahan mentah nikel bauksit, alumina, batubara. Satu per satu harus ditata agar ekspornya dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pelarangan ekspor bijih nikel (ore) sesuai dengan Undang-undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba). Kebijakan itu dapat memberikan nilai tambah terhadap industri nikel di Indonesia. Mengakhiri ekspor bijih nikel (ore) itu bukan atas dasar semata-mata surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tapi UU Minerba yang sudah menyatakan 2014 nikel berhenti di ekspor. Pasal 170 menyebutkan, pemurnian di dalam negeri harus dilakukan selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Pertambangan Minerba diundangkan. UU Minerba disahkan

² Larangan Ekspor Nikel Indonesia Ke Uni Eropa. Di akses melalui: <https://www.merdeka.com>

³ Perang Dagang Indonesia Uni Eropa Sawit Ditolak Nikel Bertindak. Di akses melalui: <http://www.money.kompas.com>

pada 12 Januari 2019. Itu artinya, ekspor bijih nikel semestinya distop pada awal 2014.

Untuk melaksanakan kebijakan itu, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Selain itu, dirilis peraturan menteri (Permen) ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang kriteria peningkatan nilai tambah. Kementerian perdagangan menegaskan pelarangan ekspor nikel bukan retaliasi (tindakan pembalasan) dagang berdasarkan permen tersebut, penjualan mineral mentah ke negara lain bisa dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun sejak terbitnya peraturan pada 11 Januari 2014. Namun, pemerintah mengubah relaksasi itu pelarangan ekspor bijih nikel bersifat final hanya bijih nikel yang telah diolah yang bisa diekspor, hal ini juga sejalan dengan rencana mendorong investasi pabrik baterai lithium untuk kendaraan listrik.

Kerangk Teori

Penulis akan menggunakan perspektif merkantilis dalam menganalisis kepentingan Indonesia melarang ekspor mineral nikel ke Uni Eropa. Dalam perspektif ini Negara mengontrol dan mempengaruhi secara langsung kegiatan ekonomi suatu negara.

Tingkat analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisa negara-bangsa (Nation-State). Menurut Mohtar Mas'ood tingkat analisa merupakan penggolongan tingkat dalam melihat sebuah fenomena dalam penelitian yang dilakukan. Mohtar Mas'ood membagi dalam lima tingkatan analisa kategori yang penting untuk

diketahui dalam sebuah studi hubungan internasional, perilaku, perilaku kelompok, negara-bangsa, dan sistem internasional.⁴ Yaitu: 1. Individu 2. perilaku kelompok 3. negara-bangsa 4. Multi Negara 5. sistem internasional.

Teori yang digunakan dalam meneliti permasalahan dalam penelitian ini adalah teori nasionalisme ekonomi nasionalisme ekonomi. Pemikiran yang dicetuskan oleh D'Costa nasionalisme ekonomi dibagi menjadi dua yaitu yang menunjukkan perbedaan antara nasionalisme ekonomi defensif dan agresif. D'Costa mengacu pada negara Cina yang dimana nasionalisme ekonominya. Nasionalisme ekonomi defensif terlihat dalam perlindungan pasar domestik dengan menolak masuknya bisnis internasional, bentuk nasionalisme ekonomi agresif menurut D'Costa adalah "menjelajah pasar global".⁵

Teori nasionalisme ekonomi berasumsi bahwa ekonomi tidak dapat di pisahkan dari politik. Menurut Gilpin (1987), nasionalisme ekonomi menganggap bahwa negara merupakan aktor utama yang akan selalu berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya termasuk dengan cara ekonomi.⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh

⁴ Mohtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta:PT.Pustaka LP3ES Indonesia. hlm 24

⁵ D'Costa, "Globalization and Economic Nationalism in Asia", (Oxford Scholarship Online: 2012).

⁶ Robert Gilpin, *the political economy of internasional relations*.Princeton University Press. 1987.

Jack C. Plano dan Roy Olton yaitu:⁷ “ *the fundamental objective and ultimate that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of these element that constitute the state most vital needs, that include self preservation, interdependence territorial integrity, military, security and economic well being.*”

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengambilan suatu keputusan ataupun kebijakan, faktor utama yang mempengaruhi oleh seseorang dalam mengambil keputusan adalah kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan Indonesia Ingin Menaikkan Nilai Tambah Ekspor Nikel

Indonesia merupakan eksportir bijih nikel terbesar di dunia dengan pangsa sebesar 28 persen pada tahun 2019. Di Uni Eropa sendiri Indonesia telah menjadi eksportir kedua terbesar untuk industri baja kawasan benua biru tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor nikel Indonesia. Terkait hal ini, Uni Eropa telah mengajukan protes dan menggugat Indonesia ke WTO karena menganggap kebijakan Indonesia tersebut telah menyulitkan industri baja (stainless steel) di kawasan

negara tersebut untuk berkompetisi dengan industri baja dunia.⁸

Seperti mengulang kejadian yang sama, apa yang dilakukan oleh Uni Eropa saat ini juga telah dilakukan Indonesia yang mengajukan gugatan ke WTO terkait tiga kebijakan komisi Uni Eropa yaitu RED II ILUC, Delegated Regulation (DR) dan French Fuel Tax pada akhir tahun 2019.

Kebijakan RED II ILUC dan DR menggolongkan minyak sawit sebagai high risk Indirect Land Use Change (ILUC) sehingga penggunaan minyak sawit sebagai feedstock biodiesel Uni Eropa akan dikurangi hingga phase-out pada tahun 2030.⁹ Sementara itu, kebijakan French Fuel Tax yang diberlakukan oleh Pemerintah Perancis memberikan pengecualian pada biodiesel sawit dari skema penurunan tarif pajak pada produksi renewable and sustainable biofuel meskipun minyak sawit yang digunakan sebagai feedstock berasal dari minyak sawit yang sustainable.

Tindakan yang diambil Uni Eropa ini tentunya sangat kontradiktif. Uni Eropa sangat menginginkan nikel Indonesia, tetapi melarang penggunaan minyak sawit di negaranya. Padahal, bijih nikel merupakan hasil tambang yang non-renewable. Sementara, minyak sawit merupakan produk renewable yang memiliki peran dan kemampuan untuk mengonservasi lahan (zat hara) dan fungsi hidrologis, hemat air dan tidak mengancam sumber air, menyerap karbon dan memproduksi oksigen hingga mampu menurunkan emisi melalui pengembangan biofuel

⁷ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*: New York Hart and Winston Inc. 1996, hlm 128

⁸ Uni Eropa Butuh Nikel Tapi Diskriminasi Sawit Indonesia. Di akses melalui: <https://www.wartaekonomi.co.id>

⁹ *Ibid*

sawit.¹⁰ Tidak hanya itu, alasan Uni Eropa meminta Indonesia untuk tetap mengekspor bijih nikel karena industri ini menjadi sumber pendapatan bagi 30 ribu pekerja langsung dan 200 ribu pekerja tidak langsung.

Namun, mereka lupa bahwa kebijakan diskriminasi sawit di Uni Eropa berpotensi merugikan dan menurunkan kesejahteraan 3 juta petani sawit dan 17 juta tenaga kerja tak langsung pada industri sawit di Indonesia. Hal ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Indonesia atau Uni Eropa adalah suatu tindakan yang wajar dalam rangka membela kepentingan dalam negerinya.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menilai pelarangan ekspor bijih nikel low grade perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah penjualan luar negeri produk turunan mineral tersebut. Terlebih, sejumlah investor dari luar negeri menyatakan ketertarikan melakukan investasi smelter dan membangun pabrik smelter nikel di Indonesia. Salah satunya dari India dengan nilai investasi mencapai US\$1 miliar. di Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Indonesia masih mengekspor bijih nikel dengan kadar 1,7 persen, nilai ekspor yang diperoleh hanya sekitar US\$600 juta hingga US\$700 juta. Sejak melakukan penghiliran nikel untuk meningkatkan nilai tambah, ekspor produk turunan bijih nikel berupa stainless steel pada 2018 mencapai US\$5,8 miliar. Tahun ini ditarget ekspor stainless steel akan senilai US\$7,2 miliar dan tahun

¹⁰ *Ibid*

depan semakin meningkat menjadi US\$12 miliar.¹¹

Angka ini akan terus bertambah sejalan dengan investasi. Kobalt yang merupakan produk turunan dari nikel akan menjadi bahan baku utama produksi litium, dan dari 70 persen keberadaannya di dunia berada di Indonesia. Keberadaan hilirisasi nikel dinilai dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Selain dapat meningkatkan nilai rantai pasok produksi, hilirisasi dapat menyelamatkan komoditas bijih nikel dari gejolak harga. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan pemerintah menyetop ekspor nikel.

Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi ini diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui capaian nilai ekspor, dalam upaya memacu daya saing industri logam dasar, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengamanatkan tentang peningkatan nilai tambah melalui pengolahan sumber daya mineral.¹² Sehingga produk yang diekspor memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor produk mineral hasil pertambangan.

¹¹ Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Bakal Meningkatkan Investasi Smelter. Doi akses melalui: <https://hisconsulting.co.id>

¹² Pemerintah Genjot Peran Industry Smelter Nikel. Di akses melalui: <https://www.merdeka.com>

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang diturunkan dalam pembentukan peraturan pelaksana berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sumber Daya Alam. Implementasi regulasi tersebut di antaranya mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.¹³ Kemudian, menekankan pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam dalam rangka peningkatan nilai tambah industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, serta jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri.

Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia Sebagai Tindakan Balasan Terkait Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa

Sebanyak 28 negara Uni Eropa sepakat memasukan minyak sawit sebagai kategori tidak berkelanjutan sehingga tidak bisa digunakan untuk biodiesel. Uni Eropa menyoroiti masalah deforestasi atau perusakan hutan akibat adanya budidaya sawit yang masif. Peraturan baru itu akan diuji coba selama dua bulan. Jika tidak ada yang berkeberatan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) ini akan dipublikasikan dalam jurnal resmi Uni Eropa. Pelarangan akan berlaku total mulai 2030 dan pengurangan dimulai sejak 2024. Pegiat lingkungan Eropa menyebut pembukaan lahan yang

terjadi akibat perluasan perkebunan sawit menyebabkan gas rumah kaca tidak dapat dinetralisir. Kampanye melawan sawit digaungkan agar negara-negara berhutan tropis seperti Indonesia dan Malaysia berhenti eksploitasi lahan untuk sawit.¹⁴

Selain jadi tergugat dalam kasus nikel, Indonesia juga berposisi sebagai penggugat di WTO dalam sengketa ekspor minyak sawit dan produk turunannya seperti biodiesel. Pada 9 Desember 2019 lalu, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di WTO.

Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia. Diskriminasi dimaksud berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan, melalui kebijakan RED II, Uni Eropa mewajibkan mulai tahun 2020 hingga tahun 2030 penggunaan bahan bakar di Uni Eropa berasal dari energi yang dapat diperbarui. Selanjutnya, Delegated Regulation yang merupakan aturan pelaksana RED II mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Polemik Kelapa Sawit Hingga Ancaman Perang Dagang Ri Uni Eropa <https://economy.okezone>.

Akibatnya, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan Uni Eropa, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia. Pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Selain akan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa, juga akan memberikan citra yang buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global.

Adanya kebebasan dalam pasar internasional ini sedikit banyak menimbulkan dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Hal tersebut menjadi tantangan sendiri bagi negara-negara yang ikut berkecimpung di dalamnya untuk memberlakukan regulasi demi regulasi guna melindungi perekonomian negara dalam sistem perdagangan internasional ini. Baik dengan cara meratifikasi regulasi internasional maupun membentuk regulasi nasional secara individu.¹⁵

Sebagai tindakan balasan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter yang sudah ada. Seakan lupa dengan kebijakan-kebijakannya yang pro

lingkungan, serta melakukan pelarangan terhadap ekspor minyak kelapa sawit karena dianggap merusak lingkungan, Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO terkait pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Uni Eropa tidak mempertimbangkan bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit.¹⁶

Keberatan dan gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dilakukan atas dasar bahwa selama ini Uni Eropa sangat bergantung dengan ekspor bijih nikel Indonesia, karena seluruh pembangunan, teknologi, dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku nikel. Belum terdapat dampak yang signifikan akibat konflik perdagangan internasional yang terjadi antara Indonesia dengan Uni Eropa tersebut. Namun sama halnya dengan konflik pada umumnya yang selalu menimbulkan dampak, baik itu menguntungkan atau merugikan, baik bagi pihak yang bersengketa maupun pihak lain disekitarnya, begitupun dengan konflik atau sengketa perdagangan internasional yang dapat menimbulkan dampak terhadap perekonomian global.¹⁷

Produksi sawit secara global, didominasi oleh Indonesia dan Malaysia sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbanyak. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pada tahun 2019 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,68 juta hektar dan bila mengacu pada data hasil rekonsiliasi luas perkebunan kelapa

¹⁵ Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto, 2020. *Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal ilmu hukum. Vol. 16 no.2. hal 226-236

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi kelapa sawit pada tahun 2018 adalah 48,68 juta ton, yang terdiri dari 40,57 juta ton minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil-CPO) dan 8,11 juta ton terdiri dari minyak inti sawit (Palm Kernel Oil - PKO).¹⁸

Meskipun demikian, pada faktanya, produksi minyak kelapa sawit tidak semengerikan seperti pertimbangan parlemen Uni Eropa ketika mengesahkan kebijakan RED II. Free For Choice Institute, sebuah institusi yang bermarkas di Italia, telah melakukan pengujian mengenai minyak nabati mana yang lebih ramah lingkungan.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Free For Choice Institute, terbukti bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling ramah lingkungan. Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan syarat mata rantai pasok yang sepenuhnya dapat tersertifikasi dan memiliki penilaian siklus hidup yang baik dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, seperti biji rapa dan bunga matahari.¹⁹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Unied Plantations Berhad yang menguji mengenai siklus hidup berbagai minyak nabati menilai bahwa minyak kelapa sawit memiliki dampak yang lebih kecil terhadap kerusakan lingkungan, seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, energi tak terbarukan dan lain-lainnya, dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Sehingga

berdasarkan data-data diatas, tindakan Uni Eropa yang mengurangi atau dapat dikatakan melarang, dalam konteks tertentu, impor minyak kelapa sawit yang didasarkan pada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, tidak dapat dibenarkan.²⁰

Tindakan Uni Eropa yang mengurangi dan/atau melarang impor minyak kelapa sawit, dapat dikatakan sebagai upaya Uni Eropa untuk memproteksi pasarnya dari produk impor dan Uni Eropa berencana untuk mengembangkan dua juta hektar lahan minyak rapa untuk mendukung kebutuhan biodieselnya atau dengan kata lain tindakan atas kebijakan tersebut didorong oleh alasan komersil guna mengumpulkan konsumen yang lebih banyak dalam pasar yang stagnan, mengingat minyak nabati yang berasal dari biji rapa dan biji bunga matahari terus terdesak oleh perkembangan CPO yang terus meningkat dari waktu ke waktu.²¹

Selanjutnya, sebagai tindakan balasan, karena dirugikan atas pelarangan impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter yang sudah ada. Berbanding terbalik dengan kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang pro terhadap lingkungan serta melakukan pelarangan terhadap

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

impor minyak kelapa sawit karena dianggap merusak lingkungan, terhadap kebijakan Indonesia yang melarang ekspor ore nikel atau bijih nikel, Uni Eropa berencana untuk mengajukan gugatan ke WTO terkait dengan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut.

Uni Eropa tidak mempertimbangkan bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Keberatan dan gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dilakukan atas dasar bahwa selama ini Uni Eropa sangat bergantung dengan ekspor bijih nikel Indonesia, karena seluruh pembangunan, teknologi, dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku nikel.²²

SIMPULAN

Akhir-akhir ini Uni Eropa melarang masuknya ekspor sawit asal Indonesia, menanggapi hal ini pemerintah Indonesia mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan-kebijakan yang dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Rencana penghentian pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati di Uni Eropa pada 2030 tercantum dokumen Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II). Pelarangan ini akan berlaku total mulai 2030 dan pengurangan dimulai sejak 2024. Negara-negara anggota Uni Eropa menyoroti masalah deforestasi atau

perusakan hutan akibat adanya budidaya sawit yang massif.

Tindakan Uni Eropa yang mengurangi dan/atau melarang impor minyak kelapa sawit, dapat dikatakan sebagai upaya Uni Eropa untuk memproteksi pasarnya dari produk impor dan Uni Eropa berencana untuk mengembangkan dua juta hektar lahan minyak rapa untuk mendukung kebutuhan biodieselnya atau dengan kata lain tindakan atas kebijakan tersebut didorong oleh alasan komersil guna mengumpulkan konsumen yang lebih banyak dalam pasar yang stagnan, mengingat minyak nabati yang berasal dari biji rapa dan biji bunga matahari terus terdesak oleh perkembangan CPO yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, sebagai tindakan balasan, karena dirugikan atas pelarangan impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter yang sudah ada.

Berbanding terbalik dengan kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang pro terhadap lingkungan serta melakukan pelarangan terhadap impor minyak kelapa sawit karena dianggap merusak lingkungan, terhadap kebijakan Indonesia yang melarang ekspor ore nikel atau bijih nikel, Uni Eropa berencana untuk mengajukan gugatan ke WTO terkait dengan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut.

²² *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

- Navigator Anda Menuju Sukses*. Bogor. Grafika Mardi Yuana.
- Sinamo, Jansen. 2011. *8 Etos Kerja Profesional Navigator Anda Menuju Sukses*. Jakart: PT Spirit Mahardika.
- Sukriyanto. 2000. *Etos Kerja Salah Satu Fkctor Survivalitas Peternak Sapi Perah. Studi Kasus di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu Kota Batu Kabupaten Malang*. Thesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
- Susilowati, Indah. 2001. *Kajian Partisipasi Wanita dan Istri Nelayan Dalam Membangun Masyarakat Pesisir (Studi Kasus pada Perkampungan Nelayan di Demak, Jawa Tengah)*, Laporan Penelitian, Kerjasama UNDIP Dengan MC Master University Canada.
- Tabrani Rusyan, dkk. 1989. *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Karya.
- Tasmara, Toto. 2002. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani Pers).